

## KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PEYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Arsari Rahma Ramly,SH

arsarirahma\_subandi@yahoo.com

### ABSTRAK

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak – hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh mematikan usaha produsen, karena produsen merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut maka upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara progresif dan komprehensif serta dapat langsung diterapkan dalam masyarakat yang nantinya diharapkan sebagai benteng bagi konsumen namun dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen tersebut bukan berarti akan ada tindakan sewenang-wenang dari konsumen yang merugikan bagi pelaku usaha hanya demi untuk perlindungan konsumen semata tetapi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan khususnya konsumen itu sendiri secara adil dan patut. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa mempunyai karakter khusus karena mempunyai sifat multifungsi, selain sebagai *adjudication* juga sekaligus sebagai *consultative function*. selain melalui peradilan umum.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal research karena berkaitan dengan masalah sosiologis mengenai kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang didukung dengan wawancara, data-data dan buku-buku yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa : Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen Kekuatan pelaksanaan putusan BPSK dalam penegakan hukum perlindungan konsumen tergantung dari adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha dan secara sukarela menjalankan putusan yang diambil BPSK yang memberikan *win-win solution*. Disamping itu peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen harus lebih komprehensif, dengan mental yang baik dari aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakat akan kepatuhan terhadap UUPK.

**Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kekuatan Hukum Putusan BPSK**

# THE LEGAL POWER OF THE THE CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT BOARD (BPSK) IN CONSUMER PROTECTION LAW ENFORCEMENT

Arsari Rahma Ramly,SH

arsarirahma\_subandi@yahoo.com

## ABSTRACT

Conditions of disadvantaged consumers, require increased efforts to protect them, in order the consumers' rights can be enforced. However, it should be noted that in providing protection to the consumers, the existence of the producers may also be put in to the appropriate circumstances because their roles are also pivotal for the country's economy. Under these conditions, empowering consumers through the establishment of the Act that can protect the interests of the progressive and comprehensive consumer and can be directly applied in to the communities interest that eventually might be expected as a citadel for the consume but, with the consumer protection laws, it does not mean that there will be an arbitrary action of treatment from consumers that can hinder the development of businesses for the sake of consumer protection alone. It is also expected that the law will provide legal certainty for businesses and consumers together in a fair and proper manner. One of the institution in question is the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) as one of the dispute resolution institutions having a special character because it has multifunctional properties, as well as adjudication and at the same time is also as a consultative function, an alternative for settling disputes outside the court.

The research method used in this study was socio-legal research because the subject being examined was related to sociological issues concerning the legal power of Consumer Dispute Settlement Board decisions supported with interviews, data, and books or references related to the research.

Based on the results of the study, the researcher concluded that: Consumer Dispute Settlement out of the court was held to reach agreement on the form and amount of compensation and / or on a certain action to ensure that the circumstances being the objects of the dispute or other similar circumstances bringing about the losses on the side of the consumers will not happen again or not be repeated by the producers or the service providers. The enforcement power of BPSK in enforcing consumer protection laws depends on the existence of good faith of the parties to resolve consumer disputes between consumers and businesses as well as voluntary willingness of both parties in implementing the decisions of BPSK that provides a win-win solution. Besides, the legislation in the field of consumer protection should be more comprehensive, with good mental of law enforcement officers, as well as public legal culture of obedience to the law.

*Keywords: Consumer Protection, Consumer Dispute Resolution, Legal Power of BPSK Decision.*